



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYIDIKAN 2023**

**DEPUTI PENINDAKAN DAN EKSEKUSI
DESEMBER 2023**

PENYIDIKAN

Kegiatan penyidikan dilaksanakan sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) perkara, yang terdiri dari perkara sisa tahun 2022 sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara dan perkara tahun 2023 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) perkara, yaitu:

Carry Over:

1. Perkara TPK dalam pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berupa Solar Home System (SHS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (LPE ESDM) tahun anggaran 2009 atas nama tersangka JACOB PURWONO (Dirjen LPE Departemen ESDM). Sprin.Dik-39/01/08/2010 tanggal 26 Agustus 2010.
2. Perkara TPK dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya dengan sumber dana DIPA Universitas Airlangga Tahun 2007 s/d 2010 dan TPK dalam peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Universitas Airlangga Tahun 2009 atas nama tersangka FASICH (Rektor/KPA Universitas Airlangga). Sprin.Dik-16/01/03/2016.
3. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DUDY JOCOM (PPK merangkap KPA pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri). Sprin.Dik-12/01/02/2017 Tanggal 20 Februari 2017.
4. Perkara TPK bersama-sama dengan Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Pirusa Sejati, yaitu memberi hadiah atau janji terkait dengan penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT. PAL Indonesia (persero) dalam pengadaan kapal SSV untuk pemerintah Filipina Tahun 2014 s.d. 2017 kepada Arif Cahyana selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (persero) bersama-sama dengan M. Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT. PAL Indonesia (persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Teknologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (persero) atas nama tersangka KIRANA KOTAMA (Swasta). Sprin.Dik-41/01/06/2017 Tanggal 8 Juni 2017.
5. Perkara TPK sehubungan dengan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Perusahaan Pertambangan di Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2007-2014 atas nama tersangka ASWAD SULAIMAN (Pj. Bupati Konawe Utara (Periode 2007-2009) dan selaku Bupati Konawe Utara (Periode 2011-2016)). Sprin.Dik-59/01/07/2017 Tanggal 27 Juli 2017.
6. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau

- kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka RITA WIDYASARI (Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2010-2015). Sprin.Dik-119/01/12/2017 tanggal 27 Desember 2017.
7. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka KHAIRUDIN (Swasta - Komisaris PT. MEDIA BANGUN BERSAMA). Sprin.Dik-120/01/12/2017 tanggal 27 Desember 2017.
 8. Perkara TPK bersama-sama H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka IZIL AZHAR (Swasta). Sprin.Dik/122/DIK.00/01/09/2018 Tanggal 28/09/2018.
 9. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DUDY JOCOM (PPK Kemendagri). Sprin.Dik/132/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018.
 10. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka DUDY JOCOM (PPK Kemendagri). Sprin.Dik/134/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018.
 11. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon serta penerimaan lainnya atas nama tersangka SUNJAYA PURWADISASTRA (Bupati Cirebon periode 2014-2019). Sprin.Dik/158/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 25/10/2018.
 12. Perkara TPK berupa penyalahgunaan wewenang dalam pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA), PT Aries Iron Mining (AIM) dan PT Billy Indonesia (BI) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah tahun 2010-2012 yang dilakukan oleh Tersangka SUPIAN HADI (Bupati Kotawaringin Timur periode 2010-2015 dan 2016-2021). Sprin.Dik/179/DIK.00/01/12/2018 Tanggal 12/12/2018.
 13. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama atau membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, atas nama tersangka SURYA DARMADI (Owner PT Darmex / PT Duta Palma Group - Swasta). Sprin.Dik/28/DIK.00/01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019.
 14. Perkara TPK suatu korporasi yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan

- kewajibannya terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014, atas nama tersangka PT. PALMA SATU (Korporasi). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/03/2019 tanggal 29 Maret 2019.
15. Perkara TPK pembangunan 4 (empat) unit kapal 60 (enam puluh) meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 atas nama tersangka AMIR GUNAWAN (Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU) – Swasta). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/04/2019 tanggal 24 April 2019.
 16. Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Suber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 atas nama tersangka ARIS RUSTANDI (Kasubdit Infrastruktur Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur, Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan). Sprin.Dik/40/DIK.00/01/04/2019 tanggal 24 April 2019.
 17. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka ISTADI PRAHASTANTO (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Sprin.Dik/41/DIK.00/01/04/2019 tanggal 25 April 2019.
 18. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka HERU SUMARWANTO (Ketua Panitia Pengadaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/04/2019 tanggal 25 April 2019.
 19. Perkara TPK pengadaan 16 (enam belas) unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FPB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015 atas nama tersangka AMIR GUNAWAN (Direktur Utama PT. Daya Radar Utama (PT. DRU) – Swasta). Sprin.Dik/43/DIK.00/01/04/2019 tanggal 25 April 2019.
 20. Perkara TPK terkait Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka PAULUS TANNOS selaku Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/82/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
 21. Perkara TPK Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2013 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang diduga dilakukan oleh Tersangka MIRYAM S. HARYANI selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan. Sprin.Dik/85/DIK.00/01/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
 22. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh

- Tersangka BAMBANG IRIANTO selaku Vice President Marketing dan Managing Director Pertamina Energy Services Pte. Ltd. Periode tahun 2009-2013 yang diberikan oleh Widodo Ratanachaitong selaku Beneficial Owner He Ming International Pte. Ltd., terkait dengan kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero). Sprin.Dik/95/DIK.00/01/08/2019 tanggal 29 Agustus 2019.
23. Perkara TPPU yang di duga dilakukan oleh Tersangka SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Sprin.Dik/114/DIK.00/01/09/2019 tanggal 11 September 2019.
 24. Perkara TPK yang dilakukan oleh Tersangka HERRY JUNG, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 terkait Perizinan PT. Cirebon Energi Prasarana. Sprin.Dik/130/DIK.00/01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
 25. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F. terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 atas nama tersangka HARUN MASIKU (Anggota DPR RI) bersama-sama dengan SAEFUL BAHRI (Sekjen DPP PDIP). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.
 26. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (*Multi Years*) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama tersangka M. NASIR (PPK). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 27. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (*Multi Years*) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama tersangka M. NASIR (PPK). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 28. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. NASIR (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)). Sprin.Dik/18/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 29. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sprin.Dik/20/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 30. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka SURYADI HALIM alias TANDO (Swasta - Komisariss Utama PT RIMBO PERADUAN). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020.
 31. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka SAIFUL ILAH (Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/04/2020 tanggal 5 Mei 2020.

32. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka NURHADI (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012 – 2016) terkait dengan pengurusan perkara dari Edy Sindoro dan kawan kawan, dan atau perbuatan menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sprin.Dik/23/DIK.00/01/03/2021 tanggal 22 Maret 2021.
33. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan, hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka NURHADI (Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012 – 2016). Sprin.Dik/24/DIK.00/01/03/2021 tanggal 22 Maret 2021
34. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. PT ANEKA TAMBANG Tbk, dalam kerja sama pengolahan anoda logam (dare kadar emas rendah) antara PT ANEKA TAMBANG Tbk., dengan PT LOCO MONTRADO Tahun 2017 atas nama tersangka DODDY MARTIMBANG (General Manager UBPP Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk - BUMN). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
35. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka TAGOP SUDARSONO SOULISA (Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
36. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas nama tersangka KMS. DANIEL alias KEMAS DANIAL (Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2010 sampai dengan tahun 2017). Sprin.Dik/52/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021.
37. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas nama tersangka STEVANUS KUSNADI (Direktur PT.PANCAMULTI NIAGAPRATAMA - swasta). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021.
38. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas

nama tersangka DODI KURNIADI (Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) dan DEDEN WAHYUDIN Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar). Sprin.Dik/54/DIK.00/01/09/2021, tanggal 16 September 2021.

39. Perkara TPPU yang diduga dilakukan oleh tersangka PUPUT TANTRIANA SARI (Bupati Probolinggo periode 2018-2023) bersama-sama dengan Tersangka HASAN AMINUDDIN (Anggota DPR RI) pada tahun 2013-2021 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Sprin.Dik/68/DIK.00/01/09/2021, tanggal 17 September 2021.
40. Perkara TPK yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka PUPUT TANTRIANA SARI (Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan periode 2018-2023) bersama-sama dengan Tersangka HASAN AMINUDDIN (Anggota DPR RI). Sprin.Dik/69/DIK.00/01/09/2021, tanggal 17 September 2021.
41. Perkara TPPU dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 yang pada saat dilakukan perbuatan untuk dan seluruh atau sebagiannya di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya serta penerimaan gratifikasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2018. Sprin.Dik/108/DIK.00/01/12/2021, tanggal 31 Desember 2021.
42. Perkara TPK berupa pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021 yang pada saat dilakukan perbuatan untuk dan seluruh atau sebagiannya di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya serta penerimaan gratifikasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2021 atas nama tersangka BUDHI SARWONO (Walikota Banjarnegara) dan KEDY AFANDI (Swasta). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
43. Perkara TPPU dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atau mnyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka BUDHI SARWONO (Walikota Banjarnegara). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022.
44. Perkara TPK terkait pelaksanaan proyek pada PT. Amarta Karya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas nama tersangka CATUR PRABOWO (Direktur Utama PT. Amarta Karya – BUMN). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.
45. Perkara TPK terkait pelaksanaan proyek pada PT. Amarta Karya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas nama tersangka TRISNA SUTISNA (Direktur Keuangan PT. Amarta Karya – BUMN). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.

46. Perkara TPPU dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, atau menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka RAHMAT EFFENDI (Walikota Bekasi periode tahun 2018 s.d. tahun 2023). Sprin.Dik/31/DIK.00/01/03/2022 tanggal 29 Maret 2022.
47. Perkara TPPU yang diduga dilakukan oleh tersangka RICHARD LOUHENAPESSY selaku Wali Kola Ambon Periode 2011-2016 dan Periode 2017-2022 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka Richard Louhenapessy dan Andrew Erin Hehanussa (Wali Kota Ambon periode 2011 s.d. 2016 dan 2017 s.d. 2022 dan Staf Sekretariat Walikota Ambon (Honorar)). Sprin.Dik/36/DIK.00/01/04/2022 tanggal 21 April 2022.
48. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan penerimaan lainnya atas nama tersangka Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/40/DIK.00/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022.
49. Perkara TPK terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka Yoory Corneles (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.
50. Perkara TPK terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka Tommy Adrian (Direktur PT Adonara Propertindo). Sprin.Dik/45/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.
51. Perkara TPK terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka Rudy Hartono Iskandar (Benefecial Owner PT Adinara Propertindo). Sprin.Dik/46/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022.
52. Perkara TPK melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka Sarimuda (Direktur Utama PT SRIWIJAYA MANDIRI SUMSEL periode 2019 s.d. 2021). Sprin.Dik/47/DIK.00/01/06/2022 tanggal 2 Juni 2022.
53. Perkara TPK Terkait Pengadaan Liquified Netroleum Gas (LNG) di PT Pertamina

- (Persero) tahun 2011-2021 atas nama tersangka Galaila Karena Kardinah alias Karen Agustiawan (Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/06/2022 tanggal 6 Juni 2022.
54. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka Aswad Sulaiman (Pj. Bupati Konawe Utara periode 2007 s.d 2009 dan Bupati Konawe Utara periode 2011 s.d 2016). Sprin.Dik/60/DIK.00/01/06/2022 tanggal 10 Juni 2022.
 55. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) atas nama tersangka Edy Rahmat (Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/07/2022 tanggal 14 Juli 2022.
 56. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Abdul Gafur Mas'ud (Bupati Penajam Paser Utara periode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.
 57. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Heriyanto (Direktur Utama Perumda Benuo Taka). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.
 58. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Karim Abidin (Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.
 59. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka Baharun Genda (Direktur Utama Perumda Penajam Benuo Taka Energi). Sprin.Dik/68/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022.
 60. Perkara TPK berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka CHANDRA TIRTA WIJAYA selaku Anggota DPR RI periode 2009 - 2014 bersama-sama dengan Tersangka ANDRI BUDHI SETIAWAN selaku Direktur Utama PT INDONESIA ADVISORY DUTA SOLUSINDO dan korporasi PT INDONESIA ADVISORY DUTA SOLUSINDO yang diberikan oleh EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE and SPACE COMPANY (EADS) France SAS / AIRBUS GROUP, terkait dengan pengadaan pesawat Airbus di PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk periode tahun 2010 – 2015 atas nama tersangka Chandra Tirta Wijaya dan Andri Budhi Setiawan (Anggota DPR RI periode 2009 – 2014 dan Direktur Utama PT INDONESIA ADVISORY DUTA SOLUSINDO). Sprin.Dik/78/DIK.00/01/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
 61. Perkara TPK suatu korporasi berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka PT INDONESIA ADVISORY DUTA SOLUSINDO bersama-sama dengan CHANDRA TIRTA WIJAYA selaku Anggota DPR RI periode 2009- 2014

- dan ANDRI BUDHI SETIAWAN selaku Direktur Utama PT INDONESIA ADVISORY DUTA SOLUSINDO yang diberikan oleh EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE and SPACE COMPANY (EADS) France SAS / AIRBUS GROUP, terkait dengan pengadaan pesawat Airbus di PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk periode tahun 2010 – 2015 atas nama tersangka PT Indonesia Advisory Duta Solusindo. Sprin.Dik/79/DIK.00/01/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
62. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan penyidikan tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat atas nama tersangka Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar Perangin Angin (Bupati Kab. Langkat (Periode 2019-2024) dan Wiraswasta (Kepala Desa Balai Kasih-Langkat). Sprin.Dik/80/DIK.00/01/09/2022 tanggal 2 September 2022.
 63. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait Pekerjaan atau Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka Lukas Enembe (Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022 tanggal 2 September 2022.
 64. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka RIJATONO LAKKA, dkk kepada LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait Pekerjaan atau Pr oyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Sprin.Dik/82/DIK.00/01/09/2022 tanggal 5 September 2022.
 65. Perkara TPK terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas nama tersangka Amring Junifan (Pejabat Pembuat Komitmen). Sprin.Dik/83/DIK.00/01/09/2022 tanggal 13 September 2022.
 66. Perkara TPK terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas nama tersangka Christian Hadi Chandra (Kuasa Direktur PT MULTI GLOBAL KONSTRINDO). Sprin.Dik/84/DIK.00/01/09/2022 tanggal 13 September 2022.
 67. Perkara TPK terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas nama tersangka Ronny Tanusaputra (selaku Penanggung Jawab Pekerjaan). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/09/2022 tanggal 13 September 2022.
 68. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Kahiril, Rahima, Mesran (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/88/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
 69. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka Hasani Hamid, Agus Rama, Bustami Yahya, Hasim Ayub, Nurhayati (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/89/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
 70. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau

- janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka Syopian, Sofyan Ali, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, Rudi Wijaya (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/90/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
71. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka M Juber, Poprianto, Tartiniah RH, Ismet Kahar (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/91/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
 72. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Djamaluddin, Muhammad Isroni, Mauli, Hasan Ibrahim (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/92/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
 73. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka Kusnindar (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/93/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022.
 74. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Suyanto (Wiraswasta dan Karyawan Swasta). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 75. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Desy Yustria (PNS). Sprin.Dik/97/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 76. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Muhajir Habibie (PNS). Sprin.Dik/98/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 77. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Albasri (PNS). Sprin.Dik/99/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 78. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Elly Tri Pangestuti (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/100/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 79. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Nurmanto Akmal (PNS). Sprin.Dik/101/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 80. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Sudrajad Dimyati (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022.
 81. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 dan penerimaan lainnya atas nama tersangka Muhammad Syahrir (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau). Sprin.Dik/103/DIK.00/01/09/2022 tanggal 30 September 2022.
 82. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka R Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan periode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/106/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

83. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Agus Eka Leandy (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
84. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Wildan Yulianto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/108/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
85. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Hosin Jamili (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/109/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
86. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Salman Hidayat (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/110/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
87. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka Achmad Mustaqim (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/111/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022.
88. Perkara TPK yaitu hakim yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Gazalba Saleh (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/112/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022.
89. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Prasetyo Nugroho (Pegawai Negeri Sipil (Asisten Hakim Agung MA Sdr. GAZALBA SALEH/Hakim Yustisial/Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/113/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022.
90. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Redhy Novariza (Pegawai Negeri Sipil (Staf Hakim Agung MA Sdr. GAZALBA SALEH/Pranata Peradilan Kamar Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/114/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022.
91. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji dari EMYLIA SAID dan HERWANSYAH selaku Terlapor kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait Perkara Perebutan Hak Ahli Waris PT Aria Citra Mulia atas nama tersangka Bambang Kayun Bagus (Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013 s.d. 2019). Sprin.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022.
92. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Edy Wibowo (Panitera pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/116/DIK.00/01/11/2022 tanggal 30 November 2022.
93. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka Sahat Tua P Simanjuntak (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim periode tahun 2019 – 2024).

Sprin.Dik/117/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.

94. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka Rusdi (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim periode tahun 2019 – 2024). Sprin.Dik/118/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.
95. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka Abdul Hamid (Kepala Desa Jelgung, Sampang, Madura) dan Ilham Wahyudi alias E'eng (Wiraswasta). Sprin.Dik/119/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022.
96. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka Ricky Ham Pagawak (Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/120/DIK.00/01/12/2022 tanggal 21 Desember 2022.

Januari

1. Perkara TPK terkait dengan pengadaan material pembangunan Kapal Angkut Tank -1 dan Kapal Angkut Tank -2 TNI AL tahun 2012- 2018 atas nama tersangka Nyoman Sudiana (Direktur Pembangunan Kapal Baru PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode 2012-2014). Sprin.Dik/01/DIK.00/01/01/2023 tanggal 4 Januari 2023.
2. Perkara TPK terkait dengan pengadaan material pembangunan Kapal Angkut Tank -1 dan Kapal Angkut Tank -2 TNI AL tahun 2012- 2018 atas nama tersangka Didi Laksamana (Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa). Sprin.Dik/02/DIK.00/01/01/2023 tanggal 4 Januari 2023.
3. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka Yosef Klau Berek (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
4. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka Martinus Bere (PNS/Kepala Bagian ULP Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
5. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka Agustinus Klau Atok (PNS/Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/05/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.

6. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka Karolus Antonius Kerek (PNS Dinas PUPR Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/06/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
7. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama Baharuddin Tony (Kuasa Direktur CV Timindo). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
8. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka Severinus Defrikandus Siribein (Direktur CV Kurnia). Sprin.Dik/08/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
9. Perkara TPK terkait pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun 2017-2020 yang dapat merugikan keuangan negara atas nama tersangka Toras Sotarduga Panggabean (Ketua KSP DANA KARYA Penyedia dana PT MITRA BINA SELARAS). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
10. Perkara TPK terkait pembayaran komisi agen oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun 2017-2020 yang dapat merugikan keuangan negara atas nama tersangka Sahata Lumbantobing (Direktur Operasi Ritel PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) tahun 2013-2019. Direktur Pengembangan Bisnis PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero) tahun 2019-2020). Sprin.Dik/10/DIK.00/01/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Februari

11. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka Wahyudi Hardi (Wiraswasta (Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar)). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/02/2023 tanggal 1 Februari 2023.
12. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka M Kuncoro Wibowo (Direktur Utama PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) tahun 2018 s.d. 2021). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
13. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka Budi Susanto (Direktur Komersil PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) tahun 2020 s.d. 2021). Sprin.Dik/13/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
14. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka April Churniawan (VP OPERasional PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero) tahun 2020). Sprin.Dik/14/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
15. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka Ivo Wongkaren (Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada).

Sprin.Dik/15/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.

16. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka Roni Ramdani (Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
17. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka Richard Cahyanto (General Manager PT Primalayan Teknologi Persada). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
18. Perkara Tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka Muhammad Syahrir (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) Sprin.Dik/18/DIK.00/01/02/2023 tanggal 4 Februari 2023.
19. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama tersangka Dedi Risdiyanto (Ketua Pokja Pembangunan Stadion Mandala Krida DIY tahun 2016 dan 2017). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/02/2023 tanggal 15 Februari 2023.
20. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Abdul Rachman (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/20/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
21. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Mubarak Ahmad (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
22. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Suhirman (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/22/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
23. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Sodik Ismanto (Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/23/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20

Februari 2023.

24. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Moh. Ramdon (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang) Sprin.Dik/24/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
25. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Bambang Haryono (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/25/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.
26. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka Raharjo (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023.

Maret

27. Perkara TPK Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 yang dilakukan oleh tersangka APRIALELY NIRMALA selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/27/DIK.00/01/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.
28. Perkara TPK Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 yang dilakukan oleh tersangka AGUS HERIJANTO selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES)/Shelter Tsunami di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tahun 2014 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/28/DIK.00/01/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.
29. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka GAZALBA SALEH (Hakim Agung Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2023 tanggal 06 Maret 2023.
30. Perkara Tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka GAZALBA SALEH (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/03/2023 tanggal 6 Maret 2023.
31. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan

- Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2016 s.d. 2019 atas nama tersangka DEN YEALTA (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang Wilayah Kota Tanjungpinang). Sprin.Dik/31/DIK.00/01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023.
32. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Proyek di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan 2016-2021 atas nama tersangka LIEM SIN TIONG (Wiraswasta). Sprin.Dik/32/DIK.00/01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023.
 33. Perkara TPK yang diduga dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi, dan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi terhadap Tersangka TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan 2016-2021 atas nama tersangka Laurenzius CS Sembiring (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/33/DIK.00/01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023.
 34. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka Prio Andi Wularso (Kepala Sub Bagian Perbendaharaan/Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) periode 2020-2022). Sprin.Dik/34/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 35. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka Novian Hari Subagyo (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2020-2021) dan Lernhard Febrian Sirait (Sekretaris PPK periode 2020-2021 dan PPK periode 2022). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 36. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka Abdullah (Bendahara Pengeluaran periode 2020-2021), Christa Handayani Pangaribowo (Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) periode 2020-2021), Rokhmat Annashikhah (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABJ) periode 2020-2021), Beni Arianto (Penguji Tagihan/SPP periode 2021), Hendi (Penguji Tagihan/SPP periode 2021), Haryat Prasetyo (PPK Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara periode 2020-2022), dan Maria Febri Valentine (Pelaksana Akuntansi/Verifikasi dan Pelaksana Perekaman Akuntansi periode 2020-2022). Sprin.Dik/36/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 37. Perkara TPK yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka Ben Brahim S Bahat (Bupati Kapuas periode tahun 2013-2018 dan periode tahun 2018-2023) dan Eri Egahni (Anggota DPR-RI periode 2019-2024). Sprin.Dik/37/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 38. Perkara TPK yaitu pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang atas nama tersangka Ben Brahim S Bahat (Bupati Kapuas periode tahun 2013-2018 dan periode tahun 2018-2023) dan Eri Egahni (Anggota DPR-RI periode 2019-2024). Sprin.Dik/38/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 39. Perkara TPK dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d. TA 2011 atas nama tersangka Izil Azhar alias Ayah Merin (Wiraswasta). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023.

40. Perkara TPK gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI). Sprin.Dik/40/DIK.00/01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.

April

41. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penyediaan perjalanan ibadah umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 dan perbuatan Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran Ganti Uang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kepulauan Meranti TA 2021 s.d. 2023 kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang atas nama tersangka Muhammad Adil (Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s.d. 2026). Sprin.Dik/41/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023.
42. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka Muhammad Adil (Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s.d. 2026). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023.
43. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka Fitria Nengsih (Kepala SKPD Pemkab Kepulauan Meranti). Sprin.Dik/43/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023.
44. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Audit atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka Muhammad Fahmi Aressa (Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023.
45. Perkara TPK berupa Pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka Fredrik Bane (Wiraswasta). Sprin.Dik/45/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
46. Perkara TPK berupa Pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka Piton Enumbi (Direktur PT. Melonesia Mulia dan PT. Lingge Lingge). Sprin.Dik/46/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
47. Perkara TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka Gerius One Yoman (Kepala Dinas Pekerjaan Umum / PPK Entrop Hamadi). Sprin.Dik/47/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
48. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh LUKAS ENEMBE terkait dengan

- pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka Stefanus Roy Rening (Advokat/Pengacara Lukas Enembe). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
49. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain alas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya alas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka Lukas Enembe (Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/49/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
50. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain alas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya alas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka Rijatono Lakka (Wiraswasta). Sprin.Dik/50/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023.
51. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada BERNHARD HASIBUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah atas nama tersangka **Dion Renato Sugiarto** (Direktur PT Istana Putra Agung). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
52. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah yang diduga dilakukan oleh Tersangka BERNHARD HASIBUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2022 s.d. 2023 bersama-sama Tersangka PUTU SUMARJAYA selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2021 s.d. 2023 atas nama tersangka **Dion Renato Sugiarto** (Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2021 s.d. 2023). Sprin.Dik/52/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
53. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada ACHMAD AFFANDY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan tahun 2021 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama **DION RENATO SUGIARTO** (Direktur PT Istana Putra Agung). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
54. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka ACHMAD AFFANDY selaku

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/54/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
55. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada SYNTHO PIRJANI HUTABARAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung yang diduga dilakukan oleh Tersangka DION RENATO SUGIARTO, Tersangka MUCHAMAD HIKMAT (Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma) dan kawan kawan Sprin.Dik/55/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
 56. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO, MUCHAMAD HIKMAT, dan kawan-kawan terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung yang diduga dilakukan oleh Tersangka SYNTHO PIRJANI HUTABARAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 Sprin.Dik/56/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
 57. Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji kepada FADLIANSYAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang diduga dilakukan oleh Tersangka atas nama tersangka Yoseph Ibrahim (Direktur PT KA Manajemen Properti) dan Parjono (VP PT KA Manajemen Properti). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
 58. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari YOSEPH IBRAHIM terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang diduga dilakukan oleh Tersangka FADLIANSYAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022 s.d. 2023 bersama-sama Tersangka HARNO TRIMADI selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/58/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023.
 59. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh Tersangka RAFAEL TRISAMBODO (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI) atas nama tersangka Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/04/2023 tanggal 14 April 2023.
 60. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka YANA MULYANA selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023, Dkk. terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta penerimaan lainnya. Sprin.Dik/60/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023.
 61. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **DADANG DARMAWAN** (Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung) bersama sama dengan YANA MULYANA selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023 terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta

- penerimaan lainnya. Sprin.Dik/61/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023.
62. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **KHAIRUR RIJAL** (Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung) bersama sama dengan YANA MULYANA selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023 terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta penerimaan lainnya. Sprin.Dik/62/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023.
 63. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka SONY SETIADI terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023 atas nama tersangka Sony Setiadi (Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO)). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023.
 64. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka BENNY (Direktur PT SMA (Sarana Mitra Adiguna)) bersama-sama dengan Andreas Guntoro terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023. Sprin.Dik/64/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 Apr 2023.
 65. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka ANDREAS GUNTORO bersama-sama dengan BENNY terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023 atas nama tersangka Andreas Guntoro (Manager PT SMA (Sarana Mitra Adiguna)). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023.

Mei

66. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung atas nama tersangka Hasbi Hasan (Sekretaris Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/05/2023 tanggal 3 Mei 2023.
67. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung atas nama tersangka Dadan Tri Yudianto (Komisaris anak perusahaan BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/05/2023 tanggal 3 Mei 2023.
68. Perkara TPK yaitu setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh atas nama tersangka Andhi Pramono (PNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI/Kepala Bea Cukai Makassar). Sprin.Dik/68/DIK.00/01/05/2023 tanggal 10 Mei 2023.
69. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diduga dilakukan oleh Tersangka EMYLIA SAID dan HERWANSYAH selaku Terlapor kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait dengan Perkara Perebutan Hak Ahli Waris PT Aria Citra Mulia atas nama tersangka Emylia Said dan Herwansyah (Swasta (PT Aria Citra Mulia)). Sprin.Dik/69/DIK.00/01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.
70. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana atas nama tersangka Andhi Pramono (PNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI/Kepala Bea Cukai Makassar). Sprin.Dik/70/DIK.00/01/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.

71. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka Siman Bahar alias Bong Kin Phin (Pemilik dan Direktur PT Loco Montrado). Sprin.Dik/71/DIK.00/01/05/2023 tanggal 22 Mei 2023.
72. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 dan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan oleh Tersangka YULMANIZAR selaku Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan. Sprin.Dik/72/DIK.00/01/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.
73. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 dan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan oleh Tersangka FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan. Sprin.Dik/73/DIK.00/01/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Juni

74. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pengadaan katalis di PT PERTAMINA (Persero) atas nama tersangka GUNARDI WANTJIK (Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak). Sprin.Dik/74/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
75. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait pengadaan katalis di PT PERTAMINA (Persero) Tahun 2012 – 2014 atas nama tersangka FREDERICK ALDO GUNARDI (Wiraswasta). Sprin.Dik/75/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
76. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, Pengolahan PT PERTAMINA (Persero) atas nama tersangka CHRISNA DAMAYANTO (Direktur Pengolahan PT PERTAMINA (Persero)). Sprin.Dik/76/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.

77. Perkara TPK bersama-sama pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, terkait pengadaan katalis di PT PERTAMINA (Persero) Tahun 2012 – 2014 atas nama tersangka ALVIN PRADIPTA ADIYOTA (Wiraswasta). Sprin.Dik/77/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
78. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka CHRISNA DAMAYANTO (Direktur Pengolahan PT PERTAMINA (Persero)). Sprin.Dik/78/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
79. Perkara TPK dalam Pengadaan Lahan HGU pada PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017 atas nama tersangka MOCHAMAD CHOLIDI alias MOHAMAD CHOLIDI (Direktur Operasional PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)). Sprin.Dik/79/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
80. Perkara TPK dalam Pengadaan Lahan HGU pada PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017 atas nama tersangka MOCHAMAD KHOIRI (Kepala Divisi Umum, Hukum dan Asel PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)). Sprin.Dik/80/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
81. Perkara TPK dalam Pengadaan Lahan HGU pada PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2016-2017 atas nama tersangka MUHCHIN KARLI (Komisaris PT. Kejayan Mas). Sprin.Dik/81/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
82. Perkara TPK dalam Pengadaan Lahan untuk Tanaman Tebu Sendiri (TS) pada PT. Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) tahun 2017 atas nama tersangka MOCHAMAD CHOLIDI alias MOHAMAD CHOLIDI. Sprin.Dik/82/DIK.00/01/06/2023 tanggal 6 Juni 2023.
83. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. Badan SAR Nasional, terkait dengan pengadaan Truk Angkut Personil 4WD dan Rescue Carrier Vehicle dan/atau pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 atas nama tersangka MAX RULAND BOSEKE (Kuasa Pengguna Anggaran). Sprin.Dik/83/DIK.00/01/06/2023 tanggal 7 Juni 2023.
84. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. Badan SAR Nasional, terkait dengan pengadaan Truk Angkut Personil 4WD dan Rescue Carrier Vehicle dan/atau pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012-2018 atas nama tersangka ANJAR SULISTIYONO (Pejabat Pembuat Komitmen). Sprin.Dik/84/DIK.00/01/06/2023 tanggal 7 Juni 2023.
85. Perkara TPK melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. Badan SAR Nasional, terkait dengan pengadaan Truk Angkut Personil 4WD dan Rescue Carrier Vehicle dan/atau pengadaan barang dan jasa lainnya di lingkungan Badan SAR Nasional Tahun 2012 – 2018 atas nama tersangka WILLIAM WIDARTA (Direktur CV DELIMA MANDIRI). Sprin.Dik/85/DIK.00/01/06/2023 tanggal 7 Juni 2023.

Juli

86. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengurusan dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh tersangka LA ODE GOMBERTO (Wiraswasta) bersama-sama dengan LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA selaku Bupati Muna. Sprin.Dik/86/DIK.00/01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.
87. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait pengurusan dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh tersangka **LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA** selaku Bupati Muna bersama-sama dengan LA ODE GOMBERTO. Sprin.Dik/87/DIK.00/01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.
88. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh tersangka **LA ODE M. SYUKUR AKBAR** (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muna) bersama-sama dengan MOCHAMAD ARDIAN NOERVIANTO selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sprin.Dik/88/DIK.00/01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.
89. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana Pinjaman PEN Daerah Kabupaten Muna di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2022 yang dilakukan oleh tersangka MOCHAMAD ARDIAN NOERVIANTO selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan LA ODE M. SYUKUR AKBAR. Sprin.Dik/89/DIK.00/01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.
90. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Muna yang dilakukan oleh LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA selaku Bupati Muna periode 2021-2024. Sprin.Dik/90/DIK.00/01/07/2023 tanggal 4 Juli 2023.
91. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka BUDIYANTO WIJAYA (Wiraswasta) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/91/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023.
92. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka ARIF YAHYA (Wiraswasta (Direktur PT Dharma Winaga)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/92/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023.
93. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka BUDIYANTO WIJAYA (Wiraswasta) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/93/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023.
94. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka TOTOK SUHARTO (PNS (Ketua Panitia Lelang I)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/94/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023.
95. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka GUSTAF URBANUS PATANDIANAN (Wiraswasta (Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/95/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023.
96. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka BUDI **WIDI ASMORO** selaku

- Manajer Engineering pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BAMBANG ANGGONO selaku General Manager pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan kawan-kawan dalam Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 s.d. 2022. Sprin.Dik/96/DIK.00/01/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.
97. Perkara TPK dalam Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 s.d. 2022 yang diduga dilakukan oleh Tersangka BAMBANG ANGGONO selaku General Manager pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. Sprin.Dik/97/DIK.00/01/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.
98. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka **NEHEMIA INDRAJAYA** selaku Direktur PT. TRUBA ENGINEERING INDONESIA, yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka BAMBANG ANGGONO selaku General Manager pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan kawan-kawan dalam Pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017 s.d. 2022. Sprin.Dik/98/DIK.00/01/07/2023 tanggal 17 Juli 2023.
99. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MARILYA** selaku Direktur Utama PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI bersama-sama dengan Tersangka MULSUNADI GUNAWAN selaku Komisaris PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI, terkait Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan Tahun 2022 s.d 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/99/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023.
100. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MULSUNADI GUNAWAN** selaku Komisaris PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI bersama-sama dengan Tersangka MARILYA selaku Direktur Utama PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI, terkait Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan Tahun 2022 s.d. 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/100/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023.
101. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RONI AIDIL** selaku Direktur Utama PT. KINDAH ABADI UTAMA, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun 2021 s.d. 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/101/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023.

Agustus

102. Perkara tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan oleh tersangka CATUR PRABOWO selaku Direktur Utama PT. Amarta Karya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sprin.Dik/102/DIK.00/01/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

103. Perkara TPK terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh Tersangka **REYNA USMAN** selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) atau selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka I NYOMAN DARMANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tersangka KARUNIA selaku Direktur PT ADI INTI MANDIRI. Sprin.Dik/103/DIK.00/01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
104. Perkara TPK terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh Tersangka I **NYOMAN DARMANTA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka REYNA USMAN selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) atau selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tersangka KARUNIA selaku Direktur PT ADI INTI MANDIRI. Sprin.Dik/104/DIK.00/01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
105. Perkara TPK terkait pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun Anggaran 2012 yang diduga dilakukan oleh Tersangka **KARUNIA** selaku Direktur PT ADI INTI MANDIRI yang secara bersama-sama atau turut serta dengan Tersangka REYNA USMAN selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) atau selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan I NYOMAN DARMANTA selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Sprin.Dik/105/DIK.00/01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
106. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka MUHAMMAD LUTFI selaku Wali Kota Bima Periode tahun 2018-2023 terkait pengadaan barang dan jasa dilindungi Pemerintah Kota Bima dan penerimaan gratifikasi. Sprin.Dik/106/DIK.00/01/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023.
107. Perkara TPK yaitu setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan oleh Tersangka EKO DARMANTO (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

September

108. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka **MOKH. SUKIMAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan bersama-sama HERMAN DWI HARYANTO, AHMAD ABDILLAH, MUHAMMAD YAN UAR MARZUKI dan kawan-kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017 s.d. TA 2019. Sprin.Dik/108/DIK.00/01/09/2023 tanggal 6 September 2023.
109. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka **AHMAD ABDILLAH** bersama-

sama HERMAN DWI HARYANTO, MUHAMMAD YANUAR MARZUKI, MOKH. SUKIMAN dan kawan-kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017 s.d. TA 2019. Sprin.Dik/109/DIK.00/01/09/2023 tanggal 6 September 2023.

110. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka **MUHAMMAD YANUAR MARZUKI** bersama-sama HERMAN DWI HARYANTO, AHMAD ABDILLAH, MOKH. SUKIMAN dan kawan-kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017 s.d. TA 2019. Sprin.Dik/110/DIK.00/01/09/2023 tanggal 6 September 2023.
111. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka **HERMAN DWI HARYANTO** selaku General Manager Divisi Regional 3 PT. BRANTAS ABIPRAYA (Persero) bersama-sama AHMAD ABDILLAH, MUHAMMAD YANUAR MARZUKI, MOKH. SUKIMAN dan kawan-kawan dalam Pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lamongan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2017 s.d. TA 2019. Sprin.Dik/111/DIK.00/01/09/2023 tanggal 6 September 2023.
112. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2015 s.d. 2020 yang dilakukan oleh Tersangka **UNTUNG HADI SANTOSA** selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013 s.d. Oktober 2018 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/112/DIK.00/01/09/2023 tanggal 13 September 2023.
113. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2015 s.d. 2020 yang dilakukan oleh Tersangka **EKO YUNI TRIYANTO** selaku Manajer Manajemen Resiko Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) periode Agustus 2012 s.d. Mei 2015 bersama-sama dengan UNTUNG HADI SANTOSA selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013 s.d. Oktober 2018 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/113/DIK.00/01/09/2023 tanggal 13 September 2023.
114. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2015 s.d. 2020 yang dilakukan oleh Tersangka **YOHANES PRIYO IRIANTONO** selaku Direktur PT. Inovasi Wahana Indonesia periode 2015 s.d. 2020 bersama-sama dengan UNTUNG HADI SANTOSA selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013 s.d.

Oktober 2018 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/114/DIK.00/01/09/2023 tanggal 13 September 2023.

115. Perkara TPK yaitu setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2015 s.d. 2020 yang dilakukan oleh Tersangka **ZULCHAIBAR** selaku Komisaris PT. Nusantara Proteksi Mandiri bersama-sama dengan UNTUNG HADI SANTOSA selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode Desember 2013 s.d. Oktober 2018 dan kawan-kawan. Sprin.Dik/115/DIK.00/01/09/2023 tanggal 13 September 2023.
116. Perkara TPK terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan menggunakan Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 atas nama tersangka **Budi Sylvana** (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI). Sprin.Dik/116/DIK.00/01/09/2023 tanggal 25 September 2023.
117. Perkara TPK terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan menggunakan Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 atas nama tersangka **Ahmad Taufik** (Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia). Sprin.Dik/117/DIK.00/01/09/2023 tanggal 25 September 2023.
118. Perkara TPK terkait Pengadaan Alat Pelindung Diri pada Kementerian Kesehatan menggunakan Dana Siap Pakai pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020 atas nama tersangka **Satrio Wibowo** (Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri). Sprin.Dik/118/DIK.00/01/09/2023 tanggal 25 September 2023.
119. Perkara TPK yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MUHAMMAD HATTA** selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian RI bersama-sama dengan SYAHRUL YASIN LIMPO dan KASDI SUBAGYONO. Sprin.Dik/119/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
120. Perkara TPK yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh Tersangka **KASDI SUBAGYONO** selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI bersama-sama dengan SYAHRUL YASIN LIMPO dan MUHAMMAD HATTA. Sprin.Dik/120/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
121. Perkara TPK yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh Tersangka **SYAHRUL YASIN LIMPO** selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019-2024, bersama-sama dengan KASDI SUBAGYONO dan MUHAMMAD HATTA. Sprin.Dik/121/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.

122. Tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diduga dilakukan oleh Tersangka SYAHRUL YASIN LIMPO selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019-2024. Sprin.Dik/122/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
123. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka **ASTA DANIKA (Direktur PT. Bakti Karya Utama)** dan kawan-kawan yaitu memberi hadiah atau janji kepada SYNTHO PIRJANI HUTABARAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung. Sprin.Dik/123/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
124. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka ZULFIKAR FAHMI (Direktur PT. KHARISMA PUTRA ADIPRATAMA) dan kawan-kawan yaitu memberi hadiah atau janji kepada SYNTHO PIRJANI HUTABARAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung. Sprin.Dik/124/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
125. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait kegiatan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Semarang, Direktorat Prasarana, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MEDI YANTO SIPAHUTAR** selaku Pemeriksa BPK bersama-sama BERNARD HASIBUAN selaku PPK dan kawan-kawan. Sprin.Dik/125/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
126. Perkara TPK berupa menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan Kewajibannya yaitu penerimaan uang per metric ton produksi batubara dari perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Karta Negara yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RITA WIDYASARI, Ph.D.** (Mantan Bupati Kutai Kertanegara) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/126/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.
127. Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji kepada STEFANUS ROBIN PATTUJU selaku Penyidik KPK terkait pengurusan pengembalian aset-aset yang disita KPK terkait TPPU dan Peninjauan Kembali (PK) yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RITA WIDYASARI, Ph.D** (Mantan Bupati Kutai Kertanegara). Sprin.Dik/127/DIK.00/01/09/2023 tanggal 27 September 2023.

Oktober

128. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari sdr. DION RENATO SUGIARTO terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik

Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang yang diduga dilakukan oleh Tersangka YOFI OKATRISZA selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017 s.d. 2021 dan penerimaan lainnya di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Sprin.Dik/128/DIK.00/01/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

November

129. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah , atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang dilakukan oleh Tersangka BUDI SANTIKA (Direktur Komersial PT Manunggaling Rizki Karyatama Telnics atau PT Marktel) terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2020-2023. Sprin.Dik/129/DIK.00/01/11/2023 tanggal 6 November 2023.
130. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka JUDI ACHMADI selaku Direktur Utama PT SIGMA CIPTA CARAKA bersama sama dengan BAKHTIAR ROSYIDI selaku Direktur Human Capital & Finance PT SIGMA CIPTA CARAKA dan kawan-kawan. Sprin.Dik/130/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.
131. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka TEJO SURYO LAKSONO selaku Direktur PT GRANARY REKA CIPTA dan kawan-kawan. Sprin.Dik/131/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.
132. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka BAKHTIAR ROSYIDI selaku Direktur Human Capital & Finance PT SIGMA CIPTA CARAKA bersama sama dengan JUDI ACHMADI selaku Direktur Utama PT SIGMA CIPTA CARAKA dan kawan-kawan. Sprin.Dik/132/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.
133. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka ROBERTO PANGASIAN LUMBAN GAOL selaku PT PRAKARSA NUSA BAKTI dan kawan-kawan. Sprin.Dik/133/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.
134. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka IMRAN MUMTAZ selaku perantara proyek dan kawan-kawan. Sprin.Dik/134/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.
135. Perkara TPK pada pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT PRAKARSA

NUSA BAKTI kepada PT SIGMA CIPTA CARAKA pada tahun 2017 dan pekerjaan pengadaan server dan storage sistem pada PT. SIGMA CIPTA CARAKA yang dilaksanakan oleh PT. GRANARY REKA CIPTA tahun 2017 yang diduga dilakukan oleh Tersangka AFRIAN JAFAR selaku perantara proyek dan kawan-kawan. Sprin.Dik/135/DIK.00/01/11/2023 tanggal 8 November 2023.

136. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024 bersama-sama EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE, yaitu memberi hadiah atau janji kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat bersama-sama ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG terkait terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/136/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.
137. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka EFER SEGIDIFAT selaku Kepala BPKAD Kabupaten Sorong bersama-sama YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024 dan MANIEL SYATFLE, yaitu memberi hadiah atau janji kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat bersama-sama ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG terkait terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/137/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.
138. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka MANIEL SYATFLE selaku Staf Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong bersama-sama YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024 dan EFER SEGIDIFAT, yaitu memberi hadiah atau janji kepada PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat bersama-sama ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG terkait terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/138/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.
139. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat bersama-sama ABU HANIFA SIATA dan DAVID PATA SAUNG, yaitu menerima hadiah atau janji dari YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024, EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/139/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.
140. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka ABU HANIFA SIATA selaku Kasubaud II PDTT BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat bersama-sama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat dan DAVID PATA SAUNG, yaitu menerima hadiah atau janji dari YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024, EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/140/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.
141. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh tersangka DAVID PATA SAUNG selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kabupaten Sorong bersama-sama PATRICE LUMUMBA SIHOMBING selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat dan ABU HANIFA SIATA, yaitu menerima hadiah atau

janji dari YAN PIET MOSSO selaku Pj Bupati Sorong Periode tahun 2022-2024, EFER SEGIDIFAT dan MANIEL SYATFLE terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Sprin.Dik/141/DIK.00/01/11/2023 tanggal 14 November 2023.

142. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka PUJI TRIASMORO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama-sama dengan ALEXANDER KRISTIAN SILAEN selaku Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso dari ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021 oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Sprin.Dik/142/DIK.00/01/11/2023 tanggal 16 November 2023.
143. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka ALEXANDER KRISTIAN SILAEN selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama-sama dengan PUJI TRIASMORO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso dari ANDHIKA IMAM WIJAYA dan YOSSY SANDRA SETIAWAN terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021 oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Sprin.Dik/143/DIK.00/01/11/2023 tanggal 16 November 2023.
144. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu yang dilakukan oleh Tersangka ANDHIKA IMAM WIJAYA dan kawan-kawan kepada PUJI TRIASMORO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama-sama dengan ALEXANDER KRISTIAN SILAEN selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021 oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Sprin.Dik/144/DIK.00/01/11/2023 tanggal 16 November 2023.
145. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu yang dilakukan oleh Tersangka YOSSY SANDRA SETIAWAN dan kawan-kawan kepada PUJI TRIASMORO selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso bersama-sama dengan ALEXANDER KRISTIAN SILAEN selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019-2021 oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso. Sprin.Dik/145/DIK.00/01/11/2023 tanggal 16 November 2023.
146. Perkara TPK yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang diduga dilakukan Tersangka HELMUT HERMAWAN (Mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri). Sprin.Dik/146/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
147. Perkara TPK yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,

yang diduga dilakukan Tersangka EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2020 – sekarang). Sprin.Dik/147/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.

148. Perkara TPK yaitu bersama- sama pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang diduga dilakukan Tersangka YOSI ANDIKA MULYADI (Asisten Pribadi Wamenkumham RI). Sprin.Dik/148/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
149. Perkara TPK yaitu bersama- sama pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang diduga dilakukan Tersangka YOGI ARIE RUKMANA (Asisten Pribadi Wamenkumham RI). Sprin.Dik/149/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
150. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Tersangka RIADO SINAGA selaku PPK pada BBPJN Kaltim, dkk., terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) Tahun Anggaran 2023. Sprin.Dik/150/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
151. Perkara TPK penyelenggara negara yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Tersangka IR. RACHMAT FADJAR Selaku Kasatker PJJ Wilayah 1 BBPJJN Kalimantan Timur, dkk., terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJJN Kaltim) Tahun Anggaran 2023. Sprin.Dik/151/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
152. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Tersangka ABDUL RAMIS selaku Direktur PT FAJAR PASIR LESTARI, dkk., terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJJN Kaltim) Tahun Anggaran 2023. Sprin.Dik/152/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
153. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Tersangka Hendra Sugiarto (Pegawai PT Fajar Pasir Lestari), dkk., terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJJN Kaltim) Tahun Anggaran 2023. Sprin.Dik/153/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.
154. Perkara TPK setiap orang yang secara bersama-sama memberi atau menjanjikan

sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan oleh Tersangka Nono Mulyatno (Direktur CV Baja Sari) terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) Tahun Anggaran 2023. Sprin.Dik/154/DIK.00/01/11/2023 tanggal 24 November 2023.

Desember

155. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa, pengurusan perijinan, dan pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utarayang di duga dilakukan oleh Tersangka ABDUL GANI KASUBA selaku Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024. Sprin.Dik/155/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
156. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba Selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama tersangka Adnan Hasanudin (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Maluku Utara). Sprin.Dik/156/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
157. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba Selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama tersangka Daud Ismail (Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara). Sprin.Dik/157/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
158. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa, pengurusan perijinan, dan pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RIDWAN ARSAN** (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara) bersama-sama dengan ABDUL GANI KASUBA selaku Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024. Sprin.Dik/158/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
159. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa, pengurusan perijinan, dan pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RAMADHAN IBRAHIM** (Ajudan Gubernur Maluku Utara) bersama-sama dengan ABDUL GANI KASUBA selaku Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024. Sprin.Dik/159/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
160. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba Selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait dengan pengurusan perijinan di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama tersangka Stevi Thomas C. (Wiraswasta). Sprin.Dik/160/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.
161. Perkara TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba Selaku Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024 terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama tersangka Kristian Wuisan (Wiraswasta). Sprin.Dik/161/DIK.00/01/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.